



PILWALKOT

Biaya Kampanye Rp3 Miliar Ditanggung APBD

JOGJA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja telah menganggarkan untuk memfasilitasi kampanye semua pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Jogja 2017 mendatang sebesar Rp3 miliar.

*Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com*

“Anggaran fasilitas kampanye paslon ini sekitar 18 persen dari total anggaran Pilkada Kota Jogja,” kata Ketua KPU Kota Jogja, Wawan Budianto di sela-sela acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Jogja dan KPU Kota Jogja di Balai Kota, Kamis (19/5).

Dalam NPHD itu diputuskan anggaran Pilwalkot Jogja Rp14,9 miliar. Dana tersebut sebagian besar akan digunakan untuk belanja barang dan jasa sampai fasilitas kampanye semua paslon. Sementara sisanya untuk honorarium petugas pilwalkot.

Wawan mengatakan fasilitas kampanye paslon yang bersumber dari APBD melalui hibah itu di antaranya alat peraga kampanye, bahan kampanye pamflet, poster, sosialisasi paslon, debat paslon, dan iklan di media massa. “Anggarannya kami asumsikan untuk lima paslon, tapi kalau pun kurang dari lima paslon

▶ Dalam NPHD itu diputuskan anggaran Pilwalkot Jogja Rp14,9 miliar.

▶ Dana pengawasan Pilwalkot belum bisa dicairkan karena masih menunggu Panwaslu dilantik.

tetap segitu anggarannya,” kata dia.

Selain biaya kampanye paslon dari APBN, akan ada pembatasan dana sumbangan masing-masing paslon. Wawan mengatakan saat ini pihaknya masing-masing menghitung kebutuhan biaya kampanye masing-masing paslon sebagai dasar untuk menetapkan pembatasan dana sumbangan bagi paslon yang diusung partai dan paslon perseorangan.

“Anggarannya kami asumsikan untuk lima paslon, tapi kalau pun kurang dari lima paslon tetap segitu anggarannya.”

Ia memastikan waktu pemungutan suara Pilwalkot Jogja akan dilaksanakan pada Februari 2017. Tahapan Pilwalkot akan dimulai pada Juni mendatang

dengan membentuk panitia ad hoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan.

Panitia ad hoc yang dibutuhkan adalah 70 orang PPK (Tiap kecamatan lima orang) dan 135 PPS (Tiga orang tiap kelurahan). Sementara masa pendaftaran paslon perseorangan 6-10 Agustus, dan paslon gabungan partai politik pada September.

Adapun dana pengawasan Pilwalkot belum bisa dicairkan karena masih menunggu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) resmi dilantik. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Muhammad Najib mengatakan pihaknya baru menyelesaikan seleksi anggota Panwaslu Kota Jogja dan Panwaslu Kabupaten Kulonprogo, masing-masing tiga orang.

Dari enam anggota Panwaslu semuanya adalah wajah baru. Mantan anggota panwaslu yang ikut mendaftar di Kota Jogja maupun Kulonprogo tidak ada satu pun terpilih. Najib mengaku seleksi anggota Panwaslu dilakukan oleh tim independen.

“Semuanya sudah terpilih tinggal menunggu pelantikan Selasa pekan depan,” kata Najib.

Setelah pelantikan, menurutnya, NPHD dana pengawas pilkada bisa segera dicairkan.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti berharap Pilwalkot Jogja nanti berjalan aman tertib dan lancar. Ia meminta semua stakeholder menjaga komitmen bersama demi kelancaran pesta demokrasi di Kota Jogja, karena Kota Jogja menjadi acuan bagi daerah lain.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Amat Segera	Untuk Ditanggapi
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005